

**Judul** : Kesenjangan Harga Memicu Lonjakan Konsumsi BBM Bersubsidi  
**Tanggal** : Kamis, 27 Agustus 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 9

## BAHAN BAKAR MINYAK

# Kesenjangan Harga Memicu Lonjakan Konsumsi BBM Bersubsidi

**JAKARTA, KOMPAS** – Peralihan konsumsi masyarakat dari bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi ke BBM bersubsidi kian meningkat. Lebarannya disparitas harga di antara kedua jenis BBM tersebut dinilai memicu migrasi konsumsi sehingga realisasi penyaluran BBM bersubsidi tahun ini diperkirakan melampaui kuota yang ditetapkan.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Wahyudi Anas menyebutkan, peningkatan konsumsi BBM jenis solar dan Pertalite masih cukup tinggi sampai 20 Agustus 2026. Meski harga Pertamina dan Dex Series menurun, kesenjangan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi masih tinggi.

"Disparitas harga masih cukup lebar dan tinggi sehingga masyarakat masih banyak yang

shift/ing ke BBM bersubsidi dan dikompensasi oleh negara," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Rapat itu turut dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), serta jajaran direksi PT Pertamina (Persero).

Menurut Wahyudi, pemenuhan BBM, terutama solar, juga disebabkan oleh kegiatan logistik yang meningkat, baik untuk ekspor maupun impor. Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dan berkompensasi juga disebut terkait dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, makanan dan minuman, akomodasi, serta pertanian.

Untuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) alias Pertalite, rata-rata penyaluran harian pada beberapa bulan pertama 2026 sekitar 75.796 kiloliter (kl).

Dengan kenaikan harga Pertamina dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250, Pertamina Green dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000, dan Pertamina Turbo menjadi Rp 20.750 per liter pada 10 Juni 2026, konsumsi harian Pertalite langsung melonjak 9,19 persen menjadi 82.700 kl.

Per 1 Juli 2026, hanya harga Pertamina Turbo yang turun dari Rp 20.750 menjadi Rp 19.300 per liter. Pada saat bersamaan, konsumsi Pertalite tetap naik menjadi 85.589 kl per hari.

Pada 1 Agustus 2026, harga Pertamina turun tipis dari Rp

16.250 menjadi Rp 15.950 per liter, Pertamina Green dari Rp 17.000 menjadi Rp 16.600, dan Pertamina Turbo dari Rp 19.300 menjadi Rp 18.300. Saat itu, konsumsi Pertalite mulai sedikit menurun.

Secara umum, kebutuhan Pertalite atau BBM bersubsidi sebesar 84.368 kl per hari. Kendati menurun, jumlah ini tetap lebih tinggi kelimbang kebutuhan harian sebelum 10 Juni 2026, yakni 75.796 kl. Artinya, meski harga BBM nonsubsidi mulai turun, konsumsi Pertalite tetap meningkat.

Pada 1 Juni 2026, harga Dexlite turun tipis dari Rp 26.000 menjadi Rp 23.000 dan Perta Dex dari Rp 27.900 menjadi Rp 24.600. Meski demikian, konsumsi solar harian masih tetap naik menjadi 56.521 kl.

Konsumsi solar juga tetap meningkat pada 10 Juni 2026 menjadi 56.827 kl kendati harga Dexlite dan Perta Dex tetap sama.

Saat harga Dexlite turun dari Rp 23.000 menjadi Rp 19.700 dan Perta Dex dari Rp 24.800

menjadi Rp 21.150 pada 1 Juli 2026, konsumsi solar masih naik menjadi 57.963 kl per hari. Demikian pula, pada 1 Agustus 2026, konsumsi harian solar tetap naik menjadi 58.271 kl kendati harga Dexlite dan Perta Dex tetap sama.

Wahyudi mengatakan, hampir semua provinsi menunjukkan realisasi penyerapan Pertalite yang melebihi kuota. Meski demikian, dia menilai, kuota yang disiapkan untuk 2026 akan tetap mencukupi.

Sampai 20 Agustus 2026, realisasi penyaluran Pertalite adalah 18,22 juta kl dari total kuota 2026 yang sebanyak 29,27 juta kl. Adapun realisasi penyaluran solar 12,44 juta kl dari kuota 20,27 juta kl, sedangkan realisasi penyaluran minyak tanah 0,33 juta kl dari kuota 0,53 juta kl.

Anggota Komisi XII dari Fraksi PDI-P, Sigit Karyawan Yunianto, mempertanyakan rendahnya realisasi pengiriman Pertalite ke Kalimantan. Sebab, masyarakat Kalimantan selama berbulan-bulan harus mengantre di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi dan berkompensasi.

Dia pun mengingatkan akan ironi bahwa Kalimantan, sebagai salah satu penyumbang minyak dan gas, selalu kekurangan listrik dan BBM.

Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, juga menyuarakan hal serupa terkait antrean yang terus mengular di jalan-jalan lintas Sumatera dan jalan kabupaten.

Dia mempertanyakan, apakah ketersediaan BBM berukuran atau ada alasan lain yang menyebabkan pasokan seakan tersendat berbulan-bulan.

Anggota Komisi XII dari (ISA)